

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara

1. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga khusus pemerintahan non departemen yang dipimpin oleh seorang Kepala BPBD dijabat ex ofisio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara dan menunjuk Kepala Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang menangani bencana didaerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman kebijakan yang telah ditelaksanakan oleh Badan Koordinasi Nasional. BPBD Kabupaten Banjaregara berdiri sejak tahun 2011 dan dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada tahun 2018 BPBD kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut telah dicapai melalui 8 (delapan) program antara lain:

1. Program Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Kesiapsiagaan
5. Mitigasi Bencana Geologi
6. Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam
7. Tanggap Darurat
8. Pengelolaan Pasca bencana.

2. Dasar Hukum Berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Bajarnegara Tahun 2008 Nomor 17 seri D nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 109), sedangkan berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Banjaregara telah menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10) merupakan hasil penataan SOTK baru) dimana BPBD tertuang pada Bab VI Ketentuan Lain lain pada pasal 11 terdiri dari:

- a. Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan Peraturan perundang undangan mengenai penanggulangan bencana.
- b. Perda mengenai pembentukan fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan Menteri.
- c. Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Kebencanaan sebagaimana dibebankan pada anggaran Pendapatan Daerah dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang undangan mengenai pelaksanaan urusan pemeritahan umum diundangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara masih merupakan sebuah lembaga eselon III dan Pelaksanaan Tupoksi masih mengacu atau berpedoman pada Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 893 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatn Banjarnegara. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Banjarnegara dibantu oleh SKPD Banjarnegara , Lembaga Internasional, Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat umum pada tahap tanggap darurat yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturah Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah..

3. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD mempunyai tugas sebagai :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara,
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan,
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana,
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari pihak lain,

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang undangan.

BPBD dalam menyelenggarakan tugasnya, mempunyai 2 fungsi yaitu :

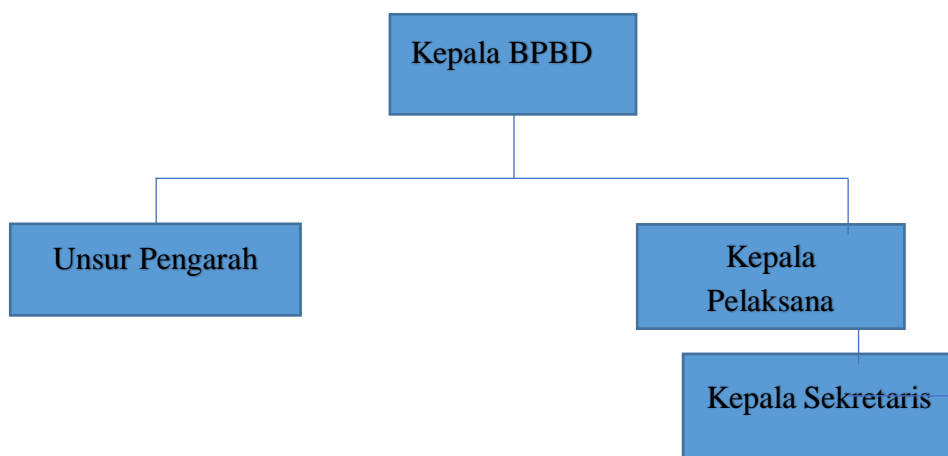
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

4. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Organisasi adalah media, wadah yang berisi orang – orang untuk melaksanakan kegiatan, aktivitas dan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Berikut merupakan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara :

Bagan 1

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara





Sumber : BPBD Kabupaten Banjarnegara Februari 2019

Dalam menanggulangi bencana, BPBD Kabupaten Banjarnegara membentuk suatu susunan organisasi pelaksana yang terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Seksi kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitas dan Rekontruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Bapak Drs Arief Rahman S.T, M.Si. Kepala Pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sehari hari yang berada dibawah tanggung jawab Bupati. Kepala pelaksana mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terintegritas yang meliputi Prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Kepala pelaksana BPBD mempunyai fungsi

koordinator, komando dan kepala pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

2. Sekretaris Unsur Pelaksana

Sekretaris Unsur Pelaksana dipimpin oleh Ibu Umi Fatmah S.sos yang bertugas untuk membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, merencanakan, membina, dan mengendalikan program-program, administrasi, kerjasama dan sumber daya dibidang penanggulangan bencana, yang meliputi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD, Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan Perundang undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga,
- b. Pembinaan dan pelaksana hubungan masyarakat dan protokoler,
- c. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana,
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya,
- e. Pengkoordinasian dalam penyusun laporan penanggulangan bencana.

3. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh bapak Andri Sulistyو SOR yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pencegahan, mitigasi dan

pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadi bencana, yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat,
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat,
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, yaitu seperti :
 - 1) Perencanaan penanggulangan bencana,
 - 2) Pengurangan resiko bencana,
 - 3) Pencegahan,
 - 4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan,
 - 5) Persyaratan analisis resiko bencana,
 - 6) Pelaksana dan penegakan rencana tata ruang,
 - 7) Pendidikan dan pelatihan,
 - 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi terdapat potensi terjadi bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini serta mitigasi bencana,
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat,

- f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pabencana serta pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik yang dipimpin Oleh bapak Agus Haryono S.Sos yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terhadap teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,
- b. Pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,
- c. Komando pelaksana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi :
 - 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
 - 2) Penetapan status keadaan darurat bencana,
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
 - 4) Pemenuhan kebutuhan dasar,
 - 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan,
 - 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- d. Pelaksana hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,

- e. Pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi yang dipimpin Oleh bapak Eko Budi Setio S.Sos yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekontruksi pada masa pasca bencana, yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana,
- b. Pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana,
- c. Penyelenggaraan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan yang meliputi :
 - 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana,
 - 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum,
 - 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
 - 4) Pemulihan sosial psikologis,
 - 5) Pelayanan kesehatan,
 - 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik,
 - 7) Pemulihan keamanan dan ketertiban,
 - 8) Pemulihan fungsi pemerintah,
 - 9) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

d. Penyelenggaraan rekontruksi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana,
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masrakat,
- 3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyakarakat,
- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana,
- 5) Partisipasi dan peran serta Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya,
- 7) Peningkatan fungsi dan palayanan publik,
- 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

e. Pelaksana hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana,

f. Pemantuan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksana kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok. Namun saat ini belum berfungsi karena terbatasnya tenaga fungsional semua bertanggungjawab kepada kepala pelaksana.. Kelompok jabatan fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok BPBD. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pejabat atau tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja masing masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana.

5. VISI dan MISI

Kabupaten Banjarnegara

a. Visi :

BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA

b. Misi :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.¹

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. VISI

Mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang tangguh dalam penanggulangan bencana.

b. MISI

¹ Sumber : [Rencana Strategis BPBD Banjarnegara Tahun 2017-2022](#)

- 1) Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana yang mantap,
- 2) Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana,
- 3) Meningkatkan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana,
- 4) Mencegah dan mengurangi resiko bencana,
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
- 6) Melaksanakan penanggulangan bencana sesuai asas dan prinsip penanggulangan bencana.

6. Hasil Rekapitulasi Data Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1
Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Bencana tahun 2018

No	Jenis Bencana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Longsor	121	Titik
2.	Banjir	6	Titik
3.	Angun Kencang	17	Titik
4.	Gempa	1	Titik
5.	Kebakaran	41	Titik
6.	Erupsi	1	Titik

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Berdasarkan data rekapitulasi kejadian bencana diatas menyatakan bahwa pada tahun 2018 mengakibatkan terjadinya 6 bencana. Salah satu bencana yang paling tinggi jumlahnya

yaitu bencana tanah longsor yaitu mempunyai 121 titik. Bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara merupakan ancaman bagi masyarakat setiap saat di daerah yang rawan. Dikarenakan tanah di wilayah Kabupaten Banjarnegara berupa lereng dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Dari data diatas kejadian bencana apabila dihitung dari awal hingga akhir tahun 2018 telah terjadi bencana berjumlah 187 titik bencana dari 6 kejadian bencana tersebut.

Tabel 2
Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Kerusakan Tahun 2018

No.	Jenis Kerusakan	Jumlah Kerusakan	Keterangan
1.	Rusak Berat	375	Rumah
2.	Rusak Sedang	295	Rumah
3.	Rusak Ringan	334	Rumah

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Berdasarkan data rekapitulasi kejadian bencana diatas berdasarkan kerusakan yang paling tinggi yaitu rusak berat dengan jumlah 375 kerusakan rumah. lalu kerusakan paling tinggi kedua yaitu rusak ringan dengan jumlah 334 kerusakan rumah, dan diperingkat paling bawah yaitu rusak sedang dengan jumlah kerusakan 295 rumah. Dalam hal kerusakan ini karena adanya faktor terjadinya bencana alam yang mengakibatkan beberapa bangunan rumah mengalami kerusakan. Jumlah keseluruhan kerusakan yang dialami pada tahun 2018 yaitu 1.004 rumah yang rusak.

Tabel 3
Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Korban Jiwa Tahun 2018

No.	Jenis Korban	Jumlah Korban	Keterangan
1.	Meninggal Dunia	2	Jiwa
2.	Luka – Luka	49	Jiwa

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa korban yang meninggal dunia karena bencana mencapai 2 korban jiwa, dan 49 korban luka luka. Pada saat kejadian korban luka luka di bawa ke rumah sakit, puskesmas, posko kesehatan terdekat dan ditangani oleh pihak yang berwenang.

Tabel 4
Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Perumahan Tahun 2018

Jenis Perumahan	Jumlah	Keterangan
Rumah	898	Unit Rumah

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Tabel 5
Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Infrastuktur Tahun 2018

No.	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Keterangan
1.	Talud	12	Titik
2.	Jembatan	19	Titik
3.	Jalan	27	Titik

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Berdasarkan data tabel diatas jumlah infrastruktur yang rusak ada 3 jenis yaitu jalan, jembatan, dan talud. Kerusakan infrastruktur yang paling tinggi adalah jalan. Dalam hal ini dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan arus jalan menjadi terputus dan banyak lobangan lobangan yang dapat membahayakan masyarakat sekitar apabila melewati jalan tersebut. Kerusakan infrastruktur yang paling tinggi ke 2 yaitu jembatan, pada akhir tahun 2018 hujan deras terjadi di Kabupaten Banjarnegara yang membuat sejumlah warga terendam banjir diwilayah wisata menuju Dieng. Jembatan beton sepanjang 10 meter dengan lebar 3 meter itu ambrol. Tebing (talud) sungai diujung jembatan turut longsor karena tertarik pondasi yang ambrol. Material jembatan tercampur tanah longsor yang jatuh dan membendung sebagian sungai, sebagian material lenyap tersapu arus. Dari data diatas disimpulkan bahwa kejadian bencana yang mengakibatkan kerokan infrastruktur berjumlah 58 titik.

Tabel 6
Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Sosial Tahun 2018

No.	Jenis Sosial	Jumlah	Keterangan
1.	Kesehatan (Puskesmas)	4	Titik
2.	Pendidikan & Kebudayaan (sekolahan, dll)	10	Titik
3.	Tempat Ibadah (masjid, gereja, wihara, pura)	4	Titik

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Berdasarkan data rekapitulasi kejadian bencana berdasarkan sosial diatas yang paling tinggi jumlahnya yaitu sarana pendidikan. Dalam hal ini karna disetiap desa/kelurahan/kecamatan mempunyai sekolah baik dari tingkat PAUD hingga

SMA/SMK/MA. Dari data diatas disimpulkan bahwa kejadian bencana berdasarkan sosial berjumlah 3 jenis dan 8 titik.

Tabel 7

Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Ekonomi Tahun 2018

No.	Jenis Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1.	Pertanian	5	Titik
2.	Kehutanan	4	Titik
3.	Peternakan	3	Titik
4.	Pasar	3	Titik
5	Perkebunan	2	Titik

Sumber BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Berdasarkan data rekapitulasi disimpulkan bahwa kejadian bencana berdasarkan ekonomi berjumlah 4 jenis dan 17 titik.

Tabel 8

Rekapitulasi Kejadian Bencana Berdasarkan Lintas Sektor Tahun 2018

Jenis Lintas Sektor	Jumlah	Keterangan
Kantor Pmerintahan (Bank)	1	Titik

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

7. Pembinaan dan Pelatihan Relawan

Pembinaan dan pelatihan relawan sangatlah penting dalam menanggulangi bencana, terutama pada saat sebelum terjadinya bencana. Pembinaan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan perilaku) dan integritas relawan.
- b. Meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, serta menunjukkan kinerja maksimal.²

Adapun aspek – aspek dalam Pembinaan Relawan yaitu :

- a. pembinaan kepemimpinan, Pengurus Lembaga Relawan berkewajiban melakukan pembinaan kepemimpinan berupa :
 - 1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan mandate utama, prinsip kerja, asas, dan tanggung jawab relawan,
 - 2) membangun komitmen bersama dalam penanggulangan bencana yang kokoh,
 - 3) mengkoordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan relawan,
 - 4) memimpin dan membangun kerjasama tim.
- b. Pembinaan Kompetensi. Pengembangan kapasitas pembinaan kompetensi relawan dilaksanakan secara, :
 - 1) bertahap, terarah, dan berkesinambungan.
 - 2) Proposional dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, dan Lembaga Pembina Relawan
 - 3) Pengembangan kapasitas, misalnya dapur umum, logistik, kesehatan pengungsi, informasi dan komunikasi, pengurangan resiko bencana dll,
 - 4) Peningkatan kompetensi dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti orientasi, geladi, Pendidikan dan pelatihan, serta simulasi.

² Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana, BAB V

- c. Pembinaan Jiwa Korsa dan Krakter, pembinaan jiwa korsa adalah tanggung jawab Lembaga Pembina teknis dimasing masing tingkatan. Pelaksanaan pembinaan dikembangkan berdasarkan prinsip prinsip atau aturan yang berlaku pada organisasi relawan.
- d. Pembinaan kelembagaan, BNPB dan BPBD membantu lembaga lembaga relawan dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan. Pembinaan kelembagaan dapat dikembangkan melalui pemberian dukungan managerial dan sumber daya untuk penguatan kelembagaan organisasi relawan.

8. Meningkatkan Kapasitas Pegawai BPBD

Kondisi personal terhadap Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut status kepegawaian tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 9
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
di BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH		KET
		L	P	
1.	PNS	12	3	
2.	PTT	0	0	
3.	THL	16	1	
	JUMLAH	28	4	

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

Komposisi pegawai yang ada di BPBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 berdasarkan status kepegawaian berjumlah 32 orang terdiri PNS 15 orang, dan THL 17 orang.

Meningkatkan kapasitas pegawai BPBD Kabupaten Banjarnegara dengan upaya peningkatan kinerja BPBD dapat menerapkan *SOP* (standar operasional prosedur). Meningkatkan kualitas dan pelayanan aparatur agar lebih mudah dan dapat menangani bencana secara maksimal, meningkatkan kerja sama tim dengan pihak lain agar dapat menghadapi

masalah dengan mudah dalam penanggulangan bencana.meningkatkan kerjasama memanfaatkan anggaran yang telah di berikan Pemerintah Pusat untuk digunakan dengan sebaik baiknya. BPBD Banjarnegara juga meningkatkan SDM dari segi kualitas dan kuantitas agar pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dalam menanggulangi bencana.

Adapun permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi BPBD, yaitu :

- a. Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :
 - 1) Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
 - 2) Keterbatasan sarana teknologi dan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan data dan informasi.
 - 3) Penanganan penanggulangan bencana membutuhkan anggaran besar, sementara APBD Kabupaten terbatas.
- b. Isu-isu Strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :
 - 1) Penanganan bencana yang belum terintegrasi dengan OPD terkait.
 - 2) Luasnya cakupan wilayah bencana dengan jenis potensi bencana yang beragam.
 - 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana.
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kebencanaan.
 - 5) Tingginya intensitas bencana di wilayah Banjarnegara.

9. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 telah menetapkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada awal tahun 2018. Perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 dicapai melalui 4 sasaran dengan 4 indikator untuk

eselon III didukung oleh 20 indikator eselon IV. Indikator diatas melalui 8 program dan 20 kegiatan.

Pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 menunjukkan rata – rata capaian kinerja dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 10
Sasaran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nilai capaian
1	Terwujudnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	18,95%
2	Tertanganinya bencana secara cepat, tepat dan sesuai sasaran	Persentase bencana yang tertangani dengan baik	100%
3	Meningkatnya indek kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	78,5
	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel	Nilai Sakip BPBD	C/49,50

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

Penjabaran dari perjanjian kinerja Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada awal tahun 2018, yaitu :

1. Sasaran strategis terjuwudnya kesiapsiagaan dalam penangulangna bencana

Indikator eselon III :

Presentase Desa Tangguh Bencana

: Target 18,95%

2. Sasaran strategis tertangani bencana secara cepat, tepat dan sesuai sasaran

Indikator eselon III :

Presentase bencana yang tertangani dengan baik : Target 100%

3. Sasaran strategis meningkatnya indek kepuasan masyarakat

Indikator eselon III :

Presentase nilai survey kepuasan masyarakat : Target 78,5 %

4. Sasaran strategi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel

Indicator eselon III :

Presentase Nilai SAKIP BPBD Banjarnegara : Target 49,50% (C)

Untuk mencapai target kinerja didukung 8 program dan 20 kegiatan

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan 5 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 kegiatan
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan 1 kegiatan
4. Program Mitigasi bencana Geologi dengan 3 kegiatan
5. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan 2 kegiatan
6. Program Penanganan Pasca bencana dengan 1 kegiatan
7. Program Kesiapsiagaan dengan 4 kegiatan
8. Program Tanggap Darurat dengan 1 kegiatan

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan program Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata rata capaian kinerja anggaran yang telah ditetapkan adalah 96,27% dan dari target 100%.sedangkan capaian kinerja sasaran adalah 99,94%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut secara umum disebabkan:

1. Perencanaan yang baik dan melibatkan stakeholders.
2. Tersedianya anggaran dan penggunaannya yang sesuai dengan rencana

3. Adanya koordinasi dan dukungan instansi terkait dan stakeholders
4. Implementasi kegiatan sesuai rencana
5. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat/kendala terlaksananya pencapaian sasaran disebabkan oleh:

1. SDM di BPBD Kabupaten Banjarnegara sangat terbatas dan tidak ada tambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang belum sebanding dengan cakupan kinerja/Volume pekerjaan yang tinggi.
2. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasif terutama untuk kondisi darurat memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak.
3. Penanganan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana.

Langkah langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka capaian sasaran tersebut adalah:

1. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kompetensinya
2. Mempersiapkan penyusunan rencana yang lebih cermat terutama dari sisi waktu.
3. Mengusulkan anggaran melalui APBD II, APBD Propinsi dan pusat untuk kegiatan pra bencana, kondisi darurat dan penanganan pasca bencana
4. Memberikan informasi kepada para penentu kebijakan, bahwa penanggulangan bencana merupakan hal sangat penting dan prioritas karena menyangkut kehidupan masyarakat, terutama yang terkena dampak bencana.

Adapun beberapa penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan :

- a. Pelayanan terhadap masyarakat cepat, mudah dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup mudah.
- b. Komunikasi dan kordinasi antar BPBD, organisasi serta masyarakat yang baik, melalui akses yang mudah sehingga pelayanan cukup baik.
- c. Kepedulian dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan di BPBD Kabupaten Banjarnegara.

2. Kegagalan :

- a. Belum selarasnya perencanaan dan penganggaran (meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan termasuk indikator)
- b. Lemahnya konsistensi penggunaan IKU belum diselaraskan dengan dokumen lainnya.
- c. Belum dilaksanakan reuiu Renstra (belum ada pedoman reuiu berkala)
- d. Belum dilaksanakan evaluasi internal (belum ada pedoman evaluasi internal)
- e. Lemahnya pengorganisasian akuntabilitas kinerja.

3. Solusi capaian kinerja yang gagal :

- a. Segera melaksanakan revisi atas dokumen dan menyelaraskan perencanaan dan anggaran.
- b. Memastikan konsistensi antara dokumen pelaporan kinerja, pengukuran, kinerja, perjanjian kinerja, RKA/DPA, RKT dengan dokumen RPJMD.
- c. Membuat Perjanjian kinerja dan Pengukuran kinerja di semua jenjang.

- d. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga terjamin keselarasan antara RPJMD, Renstra, IKU, RKPD, RKT, RKA, DPA, Penetapan Kinerja, dan LkjIP.

10. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPBD Banjarnegara

Kegiatan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD menggunakan hasil survey. Survey ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam pelayanan program yang dilakukan oleh BPBD Banjarnegara khususnya di dalam pelayanan program mitigasi bencana tanah longsor. Dari hasil survei tersebut BPBD Banjarnegara mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 11
Target Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai survey kepuasan masyarakat	78,5	81,41	103

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

Tabel 12
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

No	Usur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinenerja Unsur Pelayanan	Bobot	(3)*(5)
1	Persyaratan Pelayanan	3,175	Baik	0,111	0,352

2	Prosedur Pelayanan	3,088	Baik	0,111	0,343	Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018 Dari hasil penelitian menunjukkan nilai indeks untuk pelayanan di BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah 3,256 Apabila nilai tersebut
3	Waktu pelayanan	3,175	Baik	0,111	0,352	
4	Sasaran	3,088	Baik	0,111	0,343	
5	Produk Layanan	3,088	Baik	0,111	0,343	
6	Kompetensi Pelayanan	3,413	Baik	0,111	0,379	
7	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,111	0,382	
8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,463	Baik	0,111	0,384	
9	Sarana dan Prasarana	3,413	Baik	0,111	0,379	
Nilai Indeks					3,256	
Nilai SKM					81,412	
Mutu Pelayanan					B	
Kinerja Unit Pelayanan					Baik	

dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 81,412. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu Pelayanan di BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah B ini berarti bahwa kinerja Pelayanan di BPBD Kabupaten Banjarnegara adalah Baik.

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 9 indikator hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,256 \times 25 = 81,412$
- b. Mutu Pelayanan B
- c. Kinerja Unit Pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara BAIK.

Dari nilai unsur pelayanan terdapat nilai unsur tertinggi dan terendah yaitu :

- a. Nilai tertinggi yaitu 3,438 pada unsur Perilaku Pelaksana

Alasan : Karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugasnya dan melayani masyarakat bertindak secara tepat, cepat, dan selalu bersikap ramah kepada masyarakat baik secara administrasi maupun pada saat dilapangan.

Solusi : dalam melayanan masyarakat maka BPBD harus tetap meningkatkan pelayanan sehingga ke depan akan lebih baik lagi.

- b. Adapun nilai terendah ada 3 unsur antara lain:

- 1) Nilai prosedur pelayanan 3.088

Alasan : Pada prosedur pelayanan nilai 3,088 termasuk salah satu yang paling rendah dikarenakan dalam hal koordinasi dan informasi kadang mengalami kendala terkait sarana komunikasi dan akses koordinasi.

Solusi : Mempermudah akses koordinasi dan memperluas informasi kejadian bencana.

- 2) Nilai Sasaran 3,088

Alasan : Sebenarnya nilainya sudah baik namun dalam 9 unsur ini salah satu yang paling rendah. Hal ini disebabkan proses prosedur pemberian bantuan logistik memerlukan tahap dan waktu beberapa saata dari BPBD kepada masyarakat.

Solusi : Pihak pemohon bantuan logistik segera mengajukan permohonan bantuan logistik sesuai yang dibutuhkan dengan melengkapi berkas admisitrasinya

3) Nilai Produk Pelayanan 3,088

Alasan: Pada unsur ini sebenarnya nilai sudah baik namun tergolong rendah karena terkait dengan penanganan bencana yang melalui proses cukup lama.

Solusi: Agar proses penanganan pasca bencana berjalan dengan lancar dan tidak memerlukan waktu yang lama, perlu adanya tindakan cepat dari berbagai pihak terkait yang menangani.

11. Akuntabilitas Keuangan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Pencapaian kinerja akuntabilitas pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran . Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Banjarnegara mendapat anggaran Rp. 2.250.870.000,- realisasi Rp. 2.339.055.346,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13
Akuntabilitas Keuangan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

NO	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Kesiapsiagaan	465.000.000	456.109.499	98,5
		Mitigasi bencana Geologi	600.000.000	575.849.470	95.9
		Pencegahan dini dan	250.000.000	244.400.072	97.7

		penanggulangan korban bencana alam			
Jumlah			1.135.000.000	1.276.359.041	
2.	Tertanganinya bencana secara cepat dan tepat sesuai sasaran	Tanggap Darurat perdagangan	150.000.000	145.589.102	97
Jumlah			150.000.000	145.589.102	
3.	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Pelayanan administrasi perkantoran	780.870.000	740.192.378	94.7
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	175.000.000	167.124.825	95
Jumlah			955.870.000	907.317.203	

4.	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000	9.790.000	97.9
Jumlah			10.000.000	9.790.000	

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

Tabel 14
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

No	Program/Kegiatan	Relisasi Keuangan %	Realisasi Fisik %	Efisiensi
1	2	3	4	6
1.	Program Kesiapsiagaan.			
	- Bimtek dan sertifikasi SAR.	98	100	Terdapat efisiensi rapat dan koordinasi dengan narasumber.
	- Pembinaan Relawan	97	100	Terdapat efisiensi dalam

				pertemuan/ kordinasi
	- Pengadaan peralatan resque	94	100	Terdapat efisiensi dengan penyedia peralatan resque
	- Desa Tangguh Bencana	99	100	Terdapat efisiensi biaya makan minum.
2.	Program Mitigsi Bencana geologi			
	- Penyusunan peta resiko bencana	98	100	Terdapat efisiensi jasa pihak penyedia jasa.
	- Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana	97	100	Terdapat efisiensi perjalanan dinas dalam daerah.
	- Fasilitasi daerah rawan bencana	94	100	Terdapat efisiensi dengan pihak penyedia barang.

3.	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
	- Gladi manajemen satlak/pelatihan penanggulangan bencana	98	100	Terdapat efisiensi biaya rapat panitia.
	- Pengadaan logistik korban bencana alam	98	100	Terdapat efisiensi dengan penyedia barang
4.	Pelayanan administrasi perkantoran			
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	69	100	Terdapat efisiensi belanja air bersih untuk kekeringan
	- Penyediaan administrasi keuangan	90	100	Terdapat efisiensi honorarium petugas akuntansi yang tidak terambil

	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95	100	Terdapat efisiensi standar harga barang.
	- Penyediaan bahan logistik kantor	97	100	Terdapat efisiensi pada makan minum tamu
	- Penyediaan jasa adnistrasi perkantoran (PTT)	97	100	Terdapat efisiensi ATK.
5.	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur			
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	97	100	Terdapat efisiensi penyedia barang
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	92	100	Terdapat efisiensi belanja barang
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	92	100	Terdapat efisiensi belanja servis.

6.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	98	100	Terdapat efisiensi ATK
7.	Tanggap Darurat			
	- Optimalisasi posko bencana	98	100	Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah
8.	Penanganan pasca bencana			
	- Pengelolaan pasca bencana	94	100	Terdapat efisiensi rapat dan koordinasi dengan Propinsi.

Sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Banjarnegara tahun 2018

12. Usaha BPBD dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan utama masyarakat Banjarnegara adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bencana, mereka tahu bahwa hidup di daerah yang rawan dengan bencana tetapi mereka masih mementingkan orientasi kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, misalnya mereka tahu bahwa membuat kolam dan bercocok tanam akan membuat tanah longsor. Adanya kegiatan mitigasi, kesadaran

masyarakat mulai bertambah buktinya semakin banyak masyarakat yang meminta bantuan pohon keras dan sudah banyak desa yang membuat tim siaga bencana desa. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bencana menggambarkan bentuk komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah melalui BNPB maupun BPBD kurang efektif. Kesadaran masyarakat yang baik mengenai bencana akan berdampak baik jika bisa dilaksanakan secara efektif, jika masyarakat memiliki kesadaran bencana yang tinggi, resiko bencana yang dialami akan berkurang, bencana bisa di cegah dan korban baik material maupun non material bisa dikurangi secara signifikan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi tentang kebencanaan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana dan berperilaku tanggap bencana. BPBD Banjarnegara sudah melakukan berbagai kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. BPBD Banjarnegara telah melakukan kegiatan sosialisasi yang sudah banyak dilakukan di Banjarnegara dan cukup efektif, sosialisasi yang dilakukan dengan cara tatap muka dan simulasi penanggulangan dan ketika menghadapi bencana. Dalam sosialisasi tersebut yang disampaikan meliputi pengenalan tentang bencana tanah longsor, tanda-tanda tanah longsor, pencegahan tanah longsor dan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika tanah longsor terjadi, penyadaran tentang daerahnya sebagai daerah rawan bencana, sehingga masyarakat sadar akan bencana yang akan dihadapinya, dengan pengetahuan ini diharapkan mampu mengurangi risiko bencana. Kegiatan mitigasi yang dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi, BPBD juga membentuk struktur organisasi PRB (Pengurangan Risiko Bencana) yang terdiri dari masyarakat sekitar, ini strategi yang dilakukan oleh BPBD yaitu pelibatan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana. Kegiatan mitigasi telah dilakukan di Banjarnegara dalam bentuk struktural dan non struktural. Kegiatan

Mitigasi Bencana Non Struktural yang sudah dilakukan seperti pelatihan tanggap bencana yang di sampaikan saat kegiatan Pramuka dengan menyasar para pelajar agar kesadaran akan bencana telah diperkenalkan sejak dini, sosialisasi di setiap desa, pembentukan peta lokasi daerah rawan bencana sampai pelatihan tim evakuasi bencana, pembekalan dasar dalam upaya menyadarkan mereka tinggal di daerah yang rawan bencana, pembentukan tim PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di masing-masing desa dan pembentukan Desa Tangguh Bencana yang merupakan salah satu program Pemerintah dan BNPB. Sedangkan kegiatan mitigasi struktural yang telah dilakukan meliputi pembangunan tanggul tanggul di daerah rawan longsor. Penanaman pohon keras, relokasi dll. Selain kegiatan di atas, BPBD membentuk tim siaga bencana di desa yang rawan tanah longsor, tujuannya untuk membuat desa yang tangguh bencana sehingga jika terjadi tanah longsor maka mereka mampu menghadapi dan bangkit dari keterpurukan³. Keberadaan Tim Siaga Bencana ini sangatlah penting di tengah masyarakat, dimana masyarakat berperan sebagai pelaksana, perencana dan penyebar informasi ke masyarakat lainnya, yang dapat disebut sebagai agen perubahan sosial, dimana masyarakat bisa bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan dari anggota tim siaga bencana. Kabupaten Banjarnegara sudah memiliki 5 Tim Siaga Bencana binaan BPBD dan Gama EWS UGM, tim siaga bencana ini dilengkapi dengan fasilitas dan sosialisasi terlebih dahulu tentang penggunaan dan cara perawatan EWS, diharapkan nantinya EWS ini mampu mengurangi jumlah korban bencana. Lima daerah tersebut, yaitu:

- a. Dusun Derikan & Dusun Klesem di Desa Kalitlaga Kecamatan Pagentan.
- b. Dusun Gunungraja di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu.

³ Alifa Nur Ftri, S.I.kom, November 2015, *Pengaruh Intensitas Komunikasi Tim Siaga Bencana Terhadap Pemberitaan Bencana dan Tingkat SES Masyarakat Terhadap Perilaku Tanggap Bencana Dalam Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Banjarnegara*, jurnal dialog penanggulangan bencana Vol.6 No 2 , Jakarta.

- c. Dusun Kebakalan di Desa Kertasari Kecamatan Kalibening.
- d. Dusun Pencil di Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa.
- e. Dusun Slimpet Desa Tlaga Kecamatan Punggelan

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Banjarnegara

1. Faktor Penghambat

- a. Jumlah personil BPBD masih terbatas tidak sebanding dengan tugas yang dilaksanakan pada saat situasi darurat.

Apabila saat terjadinya bencana dengan kurangnya personil dalam bertugas maka dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan yang tidak tepat waktu. Baik laporan masalah keuangan, kebencanaan, maupun kepegawaian. Namun semua apa yang diminta untuk laporan, BPBD laksanakan sesuai dengan permintaan. Kemudian pada saat kejadian bencana terutama bencana tanah longsor petugas sangat kesulitan untuk menjalankan tugasnya karena ada beberapa kendala salah satunya yaitu jalan menuju lokasi bencanya yang kesulitan karena selain jalannya yang naik pada lokasi dataran tinggi dan jalannya yang berliku liku, walapun sarana prasana sudah terpenuhi seperti kendaraan dimex, tril dan kendaraan untuk operasinal lainnya. Serta terbatasnya juga kurangnya personil, apabila pada saat terjadinya bencana dan kejadian bencana hanya 1 tidak akan adanya permasalahan, tetapi apabila bencana itu terjadi lebih dari 1 apalagi pada saat musim hujan maka akan menyebabkan beberapa terjadinya bencana di setiap titik rawan bencana seperti bencana tanah longsor. Kendalanya ada pada *assessment* kepegawaian atau meninjau lokasi secara langsung baik pada lokasi tanah longsor ataupun bencana lainnya. Karena apabila pada saat itu juga ada bencana lebih dari 1 maka sangat dibutuhkan personil untuk

ditugaskan dalam menangani bencananya. Berhubung kurangnya personil BPBD maka dapat memperlambat pekerjaan sesuai bidangnya masing masing.

- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menempati lahan yang merupakan daerah rawah bencana.

Bencana yang paling tinggi di wilayah Kabupaten Banjarnegara mencapai 70% merupakan bencana tanah longsor yaitu di daerah pegunungan yang kondisi tanahnya memang benar benar tidak boleh dihuni untuk pemukiman maupun perumahan karna sangat berbahaya, kecuali untuk lahan pertanian tidak bermasalah. Karena kebanyakan masyarakat beranggapan akan baik baik saja dan masa bodo. Padahal BPBD sudah mengingatkan bahwa wilayah yang dihuni tersebut merupakan wilayah zona merah yang artinya tanah tersebut tidak boleh dihuni untuk pemukiman. Karena apabila pada musim hujan maka tanah yang dipakai bisa saja tidak dapat kuat menahan beban apa lagi dengan bangunan bangunan yang permanen seperti tembok yang mudah sekali dapat menyebabkan tanah bergerak dan menyebabkan longsor. beberapa alasan warga untuk tetap tinggal di lokasi tersebut karena tanah itu punya warga yang bersangkutan dan tidak ada lagi tempat untuk bertempat tinggal sehingga warga terpaksa membangun bangunan diatas tanah yang sewaktu waktu bisa kapan saja terjadi bencana tanah longsor.

- c. Penyediaan Anggaran Masih Terbatas.

Pada saat terjadinya bencana maka anggaran tersebut akan mengeluarkan dana yang sangat luar biasa, terutama pada saat setelah terjadinya bencana. Anggaran BPBD yang sangat kurang seperti untuk meningkatkan kapasitas aparatur, penanggulangan bencana, serta persediaan peralatan untuk kebencanaan. Karna dalam menanggulangi bencana peralatannya harus lengkap, contohnya seperti bencana tanah longsor yang memang sangat membutuhkan alat dan kendaraan yang berat.

Sedangkan dari pada itu sebelum terjadinya bencana yang akan datang BPBD perlu melaksanakan kegiatan semacam kapasitas Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk persiapan penanggulangan bencana. Karena dalam rangka penanganan kebencanaan harus mempunyai ilmu maupun ketrampilan yang diikuti oleh personal BPBD yang semestinya juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk kegiatan tersebut, tetapi anggaran yang sudah di tentukan tidak pernah mencukupi. Adapun kegiatan BPBD diluar kota atau provinsi yang tentunya membutuhkan anggaran untuk biaya transportasi maupun anggaran administasi lainnya. Pada kegiatan ini pun BPBD hanya mengundang 1 atau 2 personil dari staff BPBD untuk mengikuti penyelenggaraan kapasitas penanganan kebencanaan.

d. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga yang terkait.

Hambatan lain yang ada pada BPBD yaitu kurangnya koordinasi serta komunikasi kepada Lembaga atau Dinas yang terkait sehingga BPBD merasa kurang maksimal. Karena apabila ada kegiatan rapat BPBD tidak mungkin mengundang esellon yang lebih tinggi. Sehingga apabila ada undangan Rapat Koordinasi maupun Rapat Kerja tentang kebencanaan BPBD mengundang yang tanda tangan yaitu Sekretaris Daerah yang selaku Kepala BPBD. BPBD selalu mengadakan rapat tentang kebencanaan yang mengundang Kepala Dinas yang terkait, Namun pada saat rapat yang datang yaitu Wakil atau staffnya. Sehingga yang seharusnya rapat dilakukan hanya sekali dapat dilakukan lebih dari 1 kali. karena tidak mungkin wakilnya untuk memberikan keputusan karena tidak mempunyai kewenangan dan kebijakan. Karena yang mempunyai kewenangan dan kebijakan hanya pimpinan. Sehingga pelaksanaan kordinasi masih sangat kurang terhadap BPBD dengan Dinas lainnya.

2. Solusi yang akan ditempuh

- a. Meningkatkan kapasitas terhadap personil BPBD Banjarnegara dalam penanganan penanggulangan kebencanaan
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Kebencanaan, agar apa yang diharapkan instansi yang terlibat tetap siap dalam penanganan penanggulangan bencana,
- c. Melaksanakan simulasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin terutama pada daerah yang rawan bencana, dan kepada Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Syariat Islam dan Sekolah / Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana.
- d. Bekerjasama dengan instansi yang terkait, semisal instansi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DINDIKPORA) untuk membuat pelajaran muatan lokal tentang kebencanaan bagi tingkat SMP/SMA.
- e. Membuat perencanaan atau mengusulkan anggaran yang kurang terbatas untuk melaksanakan penanganan kebencanaan baik lewat APBD II, APBD 1, maupun Dana Pusat.

3. Faktor Pendukung

- a. Pencapaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 dapat terealisasi 96,27%,
- b. Berkat bantuan dan peran baik dari pemerintah, masyarakat, organisasi serta bantuan dari dunia usaha maupun relawan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, sehingga penanganan bencana tertangani dengan cepat, tepat dan sesuai sasaran.

4. Pendukung Keberhasilan

Adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mendukung untuk tahapan penanggulangan bencana dari Prabencana, saat bencana, serta pasca bencana,

- a. Sarana dan prasarana yang memadahi seperti monilitas dan peralatan kebencanaan lainnya,
- b. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk penanganan kebencanaan seperti Mitigasi struktural maupun non struktural, penanganan darurat dan pada saat pasca bencana.

5. Strategi yang akan dilaksanakan

- a. Mengajukan permohonan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan,
- b. Melakukan pendataan kebencanaan secara rutin agar tersedia data base yang akurat,
- c. Mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan dibidang kebencanaan
- d. Mengadakan Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat terutama yang bermukim didaerah rawan bencana.
- e. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Lembaga atau Dinas yang terkait guna pelaporan pendataan kebencanaan setiap tahun.